

Gorontalo Economic Review

<https://ejurnal.uigu.ac.id/index.php/ger>

Vol 1, No, 2, May 2026, Hal. 108-115

E-ISSN: 3124-0631

Integrasi Audit Keuangan Dan Akuntansi Keuangan Daerah: Opini BPK Dan Kualitas LKPD Kabupaten Gorontalo Utara 2022–2024

Maryati Kadir Thalib¹, Taufik Udango²

¹Universitas Ichsan Gorontalo Utara, Indonesia

²Universitas Ichsan Gorontalo, Indonesia

Email¹: ichythalib15@gmail.com

Email²: taufikudango25@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received: 09-03-2026

Revised: 23-03-2026

Accepted: 09-05-2026

Abstract. *This study analyzes the relationship between financial audits conducted by Indonesia's Supreme Audit Board and regional financial accounting quality in North Gorontalo Regency during 2022–2024. A qualitative descriptive case-study approach was used with secondary quantitative data from audit reports, regional audit summaries, and regional financial statistics. The results show that North Gorontalo Regency consistently received unqualified opinions for fiscal years 2022, 2023, and 2024, although recurring findings remained in cash management, local own-source revenue, and regional asset management. These findings indicate that audit opinion alone does not fully represent financial reporting quality and should be complemented by internal control effectiveness and completion of audit-recommendation follow-up.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara audit keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan kualitas akuntansi keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara selama 2022–2024. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus dan data kuantitatif sekunder dari laporan hasil pemeriksaan, ikhtisar pemeriksaan daerah, serta statistik keuangan daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara konsisten memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk tahun anggaran 2022, 2023, dan 2024, tetapi masih terdapat temuan berulang terkait pengelolaan kas, pendapatan asli daerah, dan aset daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa opini audit perlu dilengkapi dengan indikator efektivitas pengendalian internal dan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan.

Keywords: *Audit Keuangan; Akuntansi Keuangan Daerah; Opini Audit BPK; Kualitas Laporan Keuangan; Gorontalo Utara.*

Corresponden author:

Email: ichythalib15@gmail.com

Pendahuluan

Reformasi pengelolaan keuangan negara yang berlandaskan pada paket undang-undang keuangan negara telah mendorong pemerintah daerah menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Salah satu instrumen kunci untuk menilai kualitas pertanggungjawaban tersebut adalah audit keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Opini audit yang diberikan BPK mulai dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar, hingga Tidak Memberikan Pendapat menjadi indikator yang paling banyak digunakan dalam literatur akuntansi sektor publik untuk memproksikan kualitas laporan keuangan daerah. Kajian audit keuangan dan akuntansi keuangan daerah selama ini cenderung berkembang sebagai dua kepakaran yang terpisah. Riset audit sektor publik lebih banyak menyoroti efektivitas audit internal, kompetensi auditor, dan sistem pengendalian internal, sementara riset akuntansi keuangan daerah menitikberatkan pada penyusunan, penyajian, dan determinan kualitas laporan keuangan. Padahal, opini audit pada dasarnya adalah hasil interaksi antara kedua proses tersebut: audit menilai sejauh mana produk akuntansi keuangan daerah telah disusun sesuai

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan bebas dari salah saji material.

Fenomena menarik terjadi pada banyak pemerintah daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Gorontalo Utara, yang secara konsisten meraih opini WTP dalam beberapa tahun berturut-turut, namun tetap disertai sejumlah temuan pemeriksaan yang material. Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara tercatat meraih opini WTP untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut atas LKPD Tahun Anggaran 2024, sementara pada LKPD Tahun Anggaran 2023 BPK tetap mencatat sejumlah catatan khusus terkait manajemen kas pada enam entitas pemerintah di Provinsi Gorontalo, termasuk Gorontalo Utara. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penelitian: apakah opini WTP yang diraih secara konsisten benar-benar mencerminkan kualitas akuntansi keuangan daerah yang baik, atau justru menyembunyikan persoalan struktural yang berulang.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk: (1) memetakan perkembangan opini audit BPK atas LKPD Kabupaten Gorontalo Utara periode 2022–2024; (2) menganalisis pola temuan pemeriksaan BPK yang berulang meskipun opini tetap WTP; dan (3) merumuskan implikasi bagi penguatan integrasi audit keuangan dan akuntansi keuangan daerah di tingkat kabupaten. Artikel ini diharapkan memberi kontribusi akademik dengan menjembatani dua kepakaran audit keuangan dan akuntansi keuangan daerah sekaligus memberikan rujukan empiris berbasis data lokal Gorontalo Utara bagi pengambil kebijakan daerah.

Audit keuangan sektor publik merupakan proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan. Berbeda dengan audit sektor privat yang berorientasi pada kepentingan pemegang saham, audit sektor publik memiliki dimensi akuntabilitas publik yang lebih luas karena hasil audit dipertanggungjawabkan kepada lembaga legislatif dan masyarakat. Di Indonesia, kewenangan audit eksternal atas keuangan negara/daerah berada pada BPK, sedangkan audit internal dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yaitu Inspektorat Daerah pada tingkat kabupaten/kota. Kajian sistematis mengenai audit sektor publik di Indonesia mengidentifikasi tujuh kategori riset utama, yaitu kualitas

audit, temuan dan opini audit, kecurangan (fraud), karakteristik auditor, kualitas laporan keuangan, transparansi dan akuntabilitas, serta tema-tema baru yang muncul. Kajian tersebut juga mencatat bahwa publikasi akademik pada topik ini terus meningkat, meskipun perhatian terhadap keterkaitan langsung antara proses audit dan kualitas akuntansi keuangan daerah masih relatif terbatas. Studi lain menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 turut memengaruhi pelaksanaan audit atas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia, baik dari sisi metode pemeriksaan maupun ketepatan waktu penyampaian laporan. Selain itu, pertimbangan profesional auditor terhadap risiko audit turut berperan penting dalam mewujudkan tata kelola yang cerdas (smart governance) pada pemerintah daerah.

Akuntansi keuangan daerah mencakup proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan transaksi keuangan pemerintah daerah sesuai SAP berbasis akrual. Produk akhir dari proses ini adalah LKPD yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Kualitas LKPD lazim diukur melalui karakteristik kualitatif laporan keuangan relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami yang salah satu proksinya adalah opini audit BPK. Beberapa studi menunjukkan bahwa tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, karena proses tersebut mendorong perbaikan berkelanjutan atas kelemahan pengelolaan keuangan yang teridentifikasi. Determinan lain yang ditemukan memengaruhi kualitas LKPD antara lain proporsi belanja modal terhadap total anggaran, ukuran dan kemakmuran pemerintah daerah, kompetisi politik di lembaga legislatif, kompetensi sumber daya manusia pengelola keuangan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem akuntansi. Studi pada pemerintah daerah di Pulau Sumatera juga mengonfirmasi bahwa karakteristik kepala daerah dan belanja modal berhubungan dengan opini audit yang diperoleh.

Pada level konseptual, opini audit sering dikritik sebagai proksi kualitas laporan keuangan yang bersifat biner dan kurang menangkap nuansa permasalahan substantif. Riset atas dampak temuan audit, kerugian daerah, dan tindak lanjut rekomendasi audit terhadap kualitas pelayanan publik di wilayah Sulawesi menemukan bahwa semakin banyak hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK, semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan dan pada gilirannya opini audit yang diperoleh entitas. Temuan ini relevan untuk menjelaskan fenomena di Provinsi Gorontalo, di mana opini WTP tetap diikuti sejumlah catatan pemeriksaan yang harus ditindaklanjuti.

Tabel 1. Ringkasan Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Fokus Kajian	Temuan Utama
Ritonga & Suyanto (2022)	Dampak pandemi Covid-19 terhadap audit LKPD di Indonesia	Pandemi memengaruhi metode dan ketepatan waktu audit LKPD
Sudarma & Kumalawati (2022)	Pertimbangan profesional risiko audit dan smart governance	Pertimbangan risiko audit mendukung tata kelola cerdas pemda

Peneliti (Tahun)	Fokus Kajian	Temuan Utama
Studi determinan kualitas LKPD di Indonesia (2020–2023)	Tindak lanjut rekomendasi BPK dan kompetisi politik terhadap kualitas LKPD	Tindak lanjut rekomendasi audit meningkatkan transparansi dan kualitas LKPD
Studi kualitas pelaporan keuangan sektor publik Indonesia	Opini audit sebagai proksi kualitas laporan keuangan	Proporsi belanja modal tinggi berasosiasi dengan kualitas rendah; pemda besar dan makmur berkualitas lebih tinggi
Studi temuan audit & tindak lanjut terhadap layanan publik (Sulawesi)	Temuan audit, kerugian daerah, tindak lanjut, opini, dan kualitas layanan publik	Tindak lanjut rekomendasi BPK meningkatkan kualitas laporan dan opini audit
Studi determinan LKPD di Sumatera	Belanja modal, karakteristik pemda, karakteristik kepala daerah terhadap kualitas pelaporan	Karakteristik pemda dan kepala daerah berhubungan dengan opini audit
Kajian sistematis audit sektor publik Indonesia	Pemetaan tema riset audit sektor publik	Tujuh kategori riset: kualitas audit, temuan/opini, fraud, karakteristik auditor, kualitas LK, akuntabilitas, tema baru

Sumber: diolah dari literatur dalam naskah, 2026.

Berdasarkan sintesis penelitian terdahulu, tampak celah riset (research gap) berupa masih terbatasnya kajian yang secara eksplisit menjembatani proses audit keuangan dengan hasil akuntansi keuangan daerah pada level studi kasus kabupaten, khususnya di kawasan Indonesia Timur seperti Gorontalo Utara. Artikel ini berupaya mengisi celah tersebut melalui pendekatan studi kasus berbasis data LHP BPK dan data keuangan daerah tiga tahun terakhir.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus (case study) pada objek penelitian Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Pendekatan deskriptif kuantitatif digunakan sebagai pelengkap untuk menyajikan data tren opini audit dan indikator keuangan daerah selama tiga tahun anggaran, yaitu 2022, 2023, dan 2024. Data yang digunakan bersumber dari data sekunder, meliputi: (1) siaran pers dan risalah penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo atas LKPD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2022–2024; (2) Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Provinsi Gorontalo; (3) publikasi statistik keuangan dan sosial-ekonomi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gorontalo Utara; serta (4) literatur jurnal terindeks Scopus dan jurnal nasional terakreditasi lima tahun terakhir (2021–2026), maupun buku teks akuntansi sektor publik dan auditing sepuluh tahun terakhir sebagai kerangka teoretis.

Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dalam bentuk tabel tren opini audit dan kategori temuan, serta penarikan kesimpulan dengan teknik triangulasi sumber antara pemberitaan resmi BPK/pemerintah daerah, dokumen IHPD,

dan literatur akademik. Analisis difokuskan pada dua dimensi: (1) dimensi audit keuangan, yaitu jenis opini dan kategori temuan pemeriksaan; dan (2) dimensi akuntansi keuangan daerah, yaitu area akun atau siklus akuntansi yang menjadi sumber temuan (kas, pendapatan, aset, belanja).

Hasil Dan Pembahasan

Perkembangan Opini Audit BPK atas LKPD Kabupaten Gorontalo Utara 2022–2024

Tabel 2. Perkembangan Opini Audit BPK atas LKPD Kabupaten Gorontalo Utara 2022–2024

Tahun Anggaran	Opini BPK	Status Berturut-turut	Catatan/Temuan Utama
2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Bagian dari rangkaian opini WTP yang konsisten sejak beberapa tahun sebelumnya	LKPD unaudited diserahkan tepat waktu (10 Maret 2023); pemerintah daerah menargetkan opini WTP dipertahankan
2023	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Diserahkan 10 Juni 2024; salah satu dari enam entitas se-Provinsi Gorontalo yang meraih WTP	BPK tetap mengungkap catatan khusus, terutama terkait manajemen kas, meski opini tetap WTP
2024	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	WTP ke-9 secara berturut-turut; LHP diserahkan 19 Mei 2025	Jumlah dan bobot temuan menurun dibanding tahun sebelumnya, menandakan perbaikan tindak lanjut rekomendasi

Sumber: diolah dari dokumen pemeriksaan dan sumber penelitian, 2026.

Tabel di atas menunjukkan konsistensi Kabupaten Gorontalo Utara dalam mempertahankan opini WTP selama tiga tahun anggaran berturut-turut, sejalan dengan pernyataan pejabat daerah bahwa capaian tersebut merupakan bagian dari rangkaian opini WTP yang telah diraih selama sembilan tahun berturut-turut hingga LKPD Tahun Anggaran 2024. Namun demikian, konsistensi opini tersebut tidak berarti pengelolaan keuangan daerah bebas dari kelemahan. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo secara eksplisit menyatakan bahwa meskipun opini WTP diberikan, banyak catatan yang tetap disampaikan disertai rekomendasi, khususnya terkait manajemen kas pada LKPD Tahun Anggaran 2023.

Pada LKPD Tahun Anggaran 2024, pihak Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara mengonfirmasi bahwa jumlah dan bobot temuan pemeriksaan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yang diinterpretasikan sebagai indikasi meningkatnya kesadaran pimpinan unit kerja dan staf dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK. Pola ini selaras dengan temuan dalam literatur bahwa tindak lanjut rekomendasi audit berkorelasi positif dengan peningkatan kualitas laporan keuangan dari waktu ke waktu.

Pola Temuan Pemeriksaan dan Implikasinya terhadap Akuntansi Keuangan Daerah

Analisis atas temuan pemeriksaan BPK selama periode 2022–2024 menunjukkan bahwa area yang berulang menjadi sorotan meliputi tiga siklus akuntansi utama: (1) pengelolaan kas dan setara kas, yang menjadi catatan khusus BPK pada pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2023 di enam entitas pemerintah se-Provinsi Gorontalo; (2) pengelolaan pendapatan asli daerah, termasuk pajak daerah, yang juga disoroti pada pemeriksaan LKPD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2024; dan (3) pengelolaan aset daerah serta realisasi belanja peralatan dan mesin yang tidak sepenuhnya sesuai ketentuan.

DPRD Kabupaten Gorontalo Utara turut mengingatkan pemerintah daerah untuk memaksimalkan penyelesaian tindak lanjut temuan BPK atas pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2023, baik dari aspek administrasi, fisik, pihak ketiga, maupun aparatur. Hal ini menegaskan bahwa opini WTP bersifat necessary namun tidak sepenuhnya sufficient sebagai indikator kualitas akuntansi keuangan daerah; diperlukan indikator pelengkap berupa tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi audit dan efektivitas sistem pengendalian internal, sebagaimana ditegaskan dalam literatur mengenai peran sistem pengendalian internal dan tindak lanjut audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan tata kelola pemerintahan sebagai variabel moderasi.

Dari perspektif akuntansi keuangan daerah, berulangnya temuan pada siklus kas dan pendapatan mengindikasikan bahwa proses pencatatan, rekonsiliasi, dan pengendalian intern pada level operasional keuangan daerah belum sepenuhnya terintegrasi dengan hasil rekomendasi audit tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini konsisten dengan argumen dalam literatur bahwa kompetensi sumber daya manusia pengelola keuangan dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis akuntansi merupakan determinan penting kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, di luar opini audit itu semata. Dari perspektif audit keuangan, konsistensi opini WTP Kabupaten Gorontalo Utara juga dapat dipahami melalui pendekatan risiko audit, di mana auditor BPK melakukan pengujian substantif terbatas pada saldo akun tertentu berdasarkan penilaian risiko dan efektivitas sistem pengendalian internal (SPI), bukan pengujian menyeluruh atas seluruh transaksi. Pendekatan berbasis risiko ini memungkinkan opini WTP tetap diberikan sekalipun terdapat temuan pada area tertentu, sepanjang salah saji yang teridentifikasi tidak bersifat material dan pervasif terhadap laporan keuangan secara keseluruhan.

Implikasi bagi Integrasi Audit Keuangan dan Akuntansi Keuangan Daerah

Hasil kajian ini menegaskan pentingnya memandang audit keuangan dan akuntansi keuangan daerah sebagai satu kesatuan siklus akuntabilitas, bukan dua ranah yang berdiri sendiri. Penguatan peran APIP/Inspektorat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara sebagai audit internal menjadi kunci untuk memastikan temuan berulang pada siklus kas, pendapatan, dan aset dapat ditindaklanjuti secara tuntas sebelum pemeriksaan eksternal oleh BPK dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian mengenai fungsi audit internal pemerintah daerah di Indonesia yang menunjukkan bahwa efektivitas audit internal berkontribusi terhadap kualitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan yang lebih baik. Selain itu, integrasi antara fungsi akuntansi dan audit dapat diperkuat melalui digitalisasi sistem informasi akuntansi keuangan daerah

yang terhubung langsung dengan modul pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK, sehingga status penyelesaian temuan dapat dipantau secara real time oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) maupun Inspektorat. Pendekatan ini konsisten dengan rekomendasi literatur mengenai pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berbasis akrual.

Kesimpulan Dan Saran

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Tahun Anggaran 2022, 2023, dan 2024 secara konsisten. Namun demikian, konsistensi opini tersebut tetap disertai temuan pemeriksaan yang berulang pada siklus pengelolaan kas, pendapatan asli daerah, dan aset daerah. Temuan ini mengonfirmasi bahwa opini audit sebagai proksi tunggal kualitas akuntansi keuangan daerah memiliki keterbatasan, dan perlu dilengkapi dengan indikator lain seperti tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi audit dan efektivitas sistem pengendalian internal. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dengan menjembatani kepakaran audit keuangan dan akuntansi keuangan daerah melalui studi kasus empiris berbasis data lokal, sekaligus memperkaya literatur mengenai audit sektor publik di kawasan Indonesia Timur yang relatif masih terbatas dibandingkan kajian pada pemerintah daerah di Pulau Jawa dan Sumatera. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan: (1) penguatan kapasitas dan independensi Inspektorat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara sebagai APIP dalam mengawal tindak lanjut rekomendasi BPK secara tuntas; (2) digitalisasi sistem akuntansi keuangan daerah yang terintegrasi dengan modul pemantauan tindak lanjut audit; dan (3) penguatan pengawasan DPRD atas penyelesaian temuan administratif, fisik, dan kerugian daerah. Penelitian ini memiliki keterbatasan berupa penggunaan data sekunder dari pemberitaan resmi dan ringkasan LHP yang dipublikasikan, tanpa akses langsung terhadap dokumen detail LHP BPK. Penelitian lanjutan disarankan menggunakan data primer melalui wawancara dengan Inspektorat dan BKAD Kabupaten Gorontalo Utara, serta memperluas cakupan komparatif ke kabupaten/kota lain di Provinsi Gorontalo guna menguji generalisasi pola integrasi audit keuangan dan akuntansi keuangan daerah yang ditemukan dalam studi kasus ini.

Daftar Pustaka

- Agoes, S. (2021). *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik* (Edisi 6). Jakarta: Salemba Empat.
- Arens, A. A., Elder, R. J., Beasley, M. S., & Hogan, C. E. (2020). *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach* (17th ed.). Pearson Education.
- Bastian, I. (2019). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar* (Edisi 4). Jakarta: Erlangga.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Gorontalo. (2024–2025). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2022–2024*. Gorontalo: BPK RI.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo Utara. (2023–2025). *Produk Domestik Regional Bruto dan Indikator Makro Sosial Ekonomi Kabupaten Gorontalo Utara*. Gorontalo Utara: BPS.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2019). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (Edisi 5). Jakarta: Salemba Empat.

- Mahmudi. (2019). Akuntansi Sektor Publik (Edisi Revisi). Yogyakarta: UII Press.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik (Edisi Terbaru). Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara (TAKEN). (2024). A systematic review of public sector audits in Indonesia. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 10(1).
- Ritonga, I. T., & Suyanto, S. (2022). Impacts of the Covid-19 pandemic on the audit of local government financial statements: Experience from Indonesia. *Public Money & Management*, 42(6), 452–459. <https://doi.org/10.1080/09540962.2021.1964770>
- Sudarma, M., & Kumalawati, L. (2022). Professional considerations for audit risk in creating smart governance in Indonesia. [Nama jurnal terindeks Scopus].
- Studi determinan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. (2020–2023). *Review of Integrative Business and Economics Research*, 9(Supplementary Issue 3).
- Studi determinan kualitas pelaporan keuangan sektor publik: Evidence from Indonesia. *International Journal of Accounting*.
- Studi pengaruh temuan audit, kerugian daerah, dan tindak lanjut rekomendasi audit terhadap kualitas pelayanan publik melalui opini audit LKPD di Sulawesi. (2023).
- Studi determinan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di Pulau Sumatera. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*.
- Berita Gorontalo, RRI Gorontalo, ANTARA Gorontalo, Hulondalo.id, GorontaloPost.co.id, Read.id, dan Diskominfo Gorontalo Utara. (2023–2026). Kompilasi pemberitaan resmi penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2022–2024.